

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Prposionalitas Dalam Kontrak
Komersial*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2011

Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model
jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta, 2009

Gunadi Tom , *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD'45*, Bandung:
Angkasa, 1990

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010

Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan
Di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2007

Marbun Mahmud , *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty,
1987

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*,
Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Nugroho Eko Priamoko, *Kontrak Bagi Hasil Migas Aspek Hukum dan Posisi Berimbang Para Pihak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005

Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S, Sakka Pati., M.H, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008

salim H.S., M.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Suteki, *Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Malang: Surya Pena Gemilang, 2010

Wibowo. I dan Wahano Francis , *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003

B. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum
Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2010
tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman
Kejasama Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

C. Pranala Lain

<http://blh.jogjaprovo.go.id/2015/06/>

<http://www.legalakses.com/perjanjian/>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=1177.VOC>

hOYR97Fg

